

PERSEPSI MASYARAKAT DESA TERHADAP PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH: STUDI KASUS DI DESA TEGAL, KECAMATAN KEMANG, KABUPATEN BOGOR

Setiawati¹, Susi²

ABSTRAK

Program bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen kebijakan utama untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan sosial, namun keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana masyarakat penerima memaknai kebijakan tersebut, sementara kajian mendalam mengenai konstruksi persepsi masyarakat desa masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat desa terhadap program bantuan sosial pemerintah serta faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk persepsi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus berlandaskan fenomenologi di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, diskusi kelompok terarah, dan studi dokumentasi terhadap penerima bantuan, non-penerima, aparat desa, dan tokoh masyarakat, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi, member check, dan audit trail. Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat bersifat multidimensional dan ambivalen: bansos dimaknai sebagai penyelamat ekonomi, wujud kepedulian negara, dan hak sosial warga negara, namun juga berpotensi menimbulkan ketergantungan tanpa program pemberdayaan. Ketidakakuratan data, lemahnya transparansi, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi sumber utama ketidakpuasan, sementara kesadaran akan hak sosial belum diiringi kesadaran tanggung jawab berpartisipasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan bansos bergantung pada kualitas tata kelola, keadilan distributif, dan penguatan kewarganegaraan substantif yang menyeimbangkan hak dan partisipasi, serta merekomendasikan integrasi bantuan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan penguatan pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat desa.

KATA KUNCI: bantuan sosial, persepsi masyarakat, kebijakan publik, kesejahteraan sosial, kewarganegaraan substantif.

ABSTRACT

Social assistance (bansos) programs are a key policy instrument for reducing poverty and strengthening social welfare, yet their success depends heavily on how recipient communities perceive them, while in-depth accounts of how village communities construct such perceptions remain limited. This study aims to examine village communities' perceptions of government social assistance programs and the social, economic, and cultural factors shaping those perceptions. It uses a descriptive qualitative case-study approach grounded in phenomenology in Tegal Village, Kemang Subdistrict, Bogor Regency; data were collected through in-depth interviews, field observation, focus group discussions, and documentation involving beneficiaries, non-beneficiaries, village officials, and community leaders, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model and validated through source-and-method triangulation, member checking, and audit trails. Findings show that community perceptions are multidimensional and ambivalent: social assistance is seen as an economic lifeline, a manifestation of state care, and a citizen's social right, yet also as a potential source of dependency without accompanying empowerment programs. Data inaccuracy, weak transparency, and limited community participation in oversight are the main sources of dissatisfaction, while awareness of social rights has not been matched by awareness of participatory responsibility. The study concludes that the success of social assistance policy depends on governance quality, distributive justice, and stronger substantive citizenship balancing rights with participation, and recommends integrating assistance with community-based economic empowerment and civic education for village communities.

KEYWORDS: social assistance, community perception, public policy, social welfare, substantive citizenship.

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, dosen02084@unpam.ac.id

²Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, dosen02084@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Kebijakan bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem kesejahteraan sosial yang diupayakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta melindungi kelompok rentan dari risiko sosial dan ekonomi. Program ini menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada tujuan “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sejak era reformasi, program bansos telah mengalami transformasi dari sekadar bentuk karitatif menuju mekanisme perlindungan sosial yang lebih terencana dan terukur, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Bantuan Sosial Tunai (BST), hingga Program Indonesia Pintar (PIP). Berbagai kajian terbaru menegaskan bahwa program-program tersebut terbukti membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan, meskipun efektivitasnya masih bervariasi antarwilayah (Pangera et al., 2025; Syata, 2024). Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen dari total populasi, angka terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir, namun disertai kenaikan rasio gini menjadi 0,368 yang mengindikasikan pelebaran ketimpangan pendapatan (Investor Trust, 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan agregat belum tentu selaras dengan pemerataan kesejahteraan, sehingga persepsi

masyarakat terhadap keadilan distribusi bantuan sosial menjadi semakin relevan untuk dikaji.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan bansos di tingkat desa tidak semata ditentukan oleh besaran anggaran atau cakupan penerima, melainkan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memahami, menilai, dan memaknai kebijakan tersebut. Persepsi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program, baik dalam aspek penerimaan, partisipasi, maupun dampak sosial yang dihasilkan. Persepsi positif akan mendorong penerima bantuan untuk memanfaatkan dana secara produktif dan turut serta dalam pengawasan, sedangkan persepsi negatif dapat memunculkan sikap apatis, ketergantungan, bahkan konflik sosial di tingkat lokal (Mahfudhoh & Kinseng, 2023). Kepercayaan publik terhadap pemerintah, termasuk pemerintah desa, terbukti menjadi mediator penting yang menjembatani transparansi kelembagaan dengan partisipasi warga dalam kehidupan bernegara (Somanteri & Rachmat, 2025).

Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di tingkat akar rumput masih menghadapi sejumlah persoalan struktural. Ketidaktepatan sasaran penerima akibat data yang tidak termutakhirkan secara berkala menjadi persoalan yang berulang ditemukan di berbagai daerah (Widyaningsih et al., 2023), sementara audit terhadap penyaluran bantuan sosial di beberapa daerah mengungkap adanya penerima yang tidak memenuhi kriteria kelayakan akibat lemahnya sinkronisasi data lintas instansi (Azzahra et al., 2025). Persoalan ketidakmerataan distribusi turut diperparah oleh keterbatasan transparansi dalam proses pendataan, sehingga masyarakat kerap tidak memahami dasar penetapan penerima bantuan

(Ariansyah et al., 2025; Fardi et al., 2023). Dalam banyak kasus, masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pendataan maupun penyaluran bantuan, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap aparat desa dan pemerintah daerah. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Selain aspek administratif, konteks sosial dan budaya masyarakat desa turut memengaruhi cara pandang terhadap program bantuan sosial. Nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan rasa keadilan yang melekat dalam kehidupan masyarakat pedesaan sering kali berbenturan dengan logika birokratis program bantuan yang bersifat administratif-prosedural. Ketika satu keluarga miskin tidak mendapatkan bantuan sementara tetangganya yang dianggap lebih mampu justru menerima, muncul persepsi ketidakadilan yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan bahkan memicu konflik horizontal antarwarga (Keladu et al., 2026; Mahfudhoh & Kinseng, 2023). Fenomena penyalahgunaan instrumen bantuan, seperti praktik menggadaikan kartu penerima manfaat akibat tekanan ekonomi, juga menjadi indikasi bahwa persepsi dan perilaku masyarakat terhadap bansos dibentuk oleh pengalaman hidup yang kompleks, bukan semata-mata oleh desain kebijakan di atas kertas (Dewi et al., 2022).

Dalam situasi pascapandemi COVID-19, urgensi program bantuan sosial semakin meningkat karena banyak masyarakat desa mengalami penurunan pendapatan dan keterbatasan akses terhadap sumber ekonomi. Pemerintah memperluas cakupan bantuan melalui skema seperti BLT-DD, namun di sisi lain muncul persoalan baru terkait validitas data, kecepatan distribusi, dan akuntabilitas

penyaluran (Robi et al., 2023). Studi mengenai evaluasi BPNT di berbagai kabupaten juga menegaskan bahwa program bantuan pangan mampu meringankan beban rumah tangga miskin, tetapi efektivitasnya tetap dibayangi oleh persoalan ketepatan sasaran dan keberlanjutan dampak (Nauval & Suparti, 2025). Program jaring pengaman sosial yang menysasar keberlangsungan pendidikan anak, seperti PKH dan PIP, juga terbukti membantu mempertahankan akses pendidikan keluarga miskin meskipun efektivitasnya bervariasi menurut konteks daerah (Prastya et al., 2026). Kondisi-kondisi ini menuntut adanya evaluasi berbasis persepsi masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak dan mengetahui secara langsung dinamika di lapangan. Realisasi penyaluran bantuan sosial nasional hingga pertengahan 2026 turut memperlihatkan skala keterlibatan program ini, dengan Program Keluarga Harapan telah disalurkan kepada 9,70 juta keluarga penerima manfaat (97,10 persen dari target) dan bantuan pangan menjangkau 17,51 juta keluarga (95,99 persen dari target) (Investor Trust, 2026). Di sisi lain, Kementerian Sosial juga terus memutakhirkan basis data penerima melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang pada triwulan II 2026 mencoret 11.014 keluarga penerima manfaat yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria (inclusion error) serta memasukkan 25.665 keluarga baru ke dalam kelompok layak menerima (Tirto.id, 2026). Dinamika pemutakhiran data berskala nasional ini memperkuat urgensi memahami bagaimana masyarakat di tingkat desa memaknai dan merespons perubahan status kepesertaan bantuan sosial yang dialami secara langsung.

Di sisi lain, sejumlah kajian juga mengingatkan adanya risiko ketergantungan

(dependency) sebagai konsekuensi tidak diinginkan dari bantuan sosial yang diberikan secara berkelanjutan tanpa diiringi program pemberdayaan ekonomi. Bantuan yang diterima dalam jangka panjang tanpa mekanisme keluar (exit strategy) yang jelas berpotensi melemahkan motivasi kerja dan kemandirian ekonomi sebagian penerima manfaat (Nurahman et al., 2025; Wahyudi et al., 2026). Perdebatan mengenai bagaimana masyarakat mengonstruksi kelayakan (deservingness) penerima bantuan turut menjadi isu sentral dalam literatur kebijakan sosial secara global. Kajian eksperimental terbaru menunjukkan bahwa framing kebijakan kesejahteraan memengaruhi persepsi publik secara signifikan terhadap legitimasi program (Lowder, 2025), sementara persepsi yang telah lama tertanam mengenai siapa yang “layak” menerima bantuan turut membentuk sikap publik terhadap kelayakan peserta program kesejahteraan (Haeder, 2025). Temuan-temuan lintas konteks ini memperkuat argumen bahwa persepsi masyarakat bukan sekadar variabel pelengkap, melainkan faktor sentral yang menentukan keberlanjutan dan legitimasi kebijakan bantuan sosial.

Isu persepsi masyarakat terhadap bantuan sosial juga tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai kewarganegaraan substantif, yaitu keseimbangan antara hak sosial warga negara dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan publik. Ketika masyarakat memandang bansos semata sebagai hak yang harus diterima tanpa disertai kesadaran akan pentingnya partisipasi dan kontrol sosial, maka relasi antara negara dan warga negara cenderung timpang dan rentan terhadap praktik klientelisme (Nurhadi, 2026). Penguatan kesadaran ini idealnya dibangun

sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya menekankan pemahaman hak, tetapi juga tanggung jawab dan partisipasi warga dalam kehidupan demokratis (Cicilia et al., 2022).

Secara konseptual, penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka teoretis yang saling melengkapi. Pertama, teori persepsi sosial menjelaskan bahwa penilaian individu terhadap suatu objek atau kebijakan terbentuk melalui proses kognisi sosial yang melibatkan interpretasi atas stimulus, pengalaman, dan konteks sosial di sekitarnya (Satria & Neviyarni, 2025); kerangka ini menjadi dasar untuk memahami keragaman cara masyarakat Desa Tegal memaknai program bansos. Kedua, konsep perlindungan sosial (social protection) menempatkan bantuan sosial sebagai salah satu pilar pembangunan sosial untuk melindungi kelompok rentan dari risiko kemiskinan sekaligus mendorong kapabilitas ekonomi penerima manfaat, bukan sekadar transfer karitatif yang bersifat sementara (Midgley, 2020); konsep ini relevan untuk menilai sejauh mana bansos di Desa Tegal telah berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang produktif. Ketiga, pendekatan fenomenologi Alfred Schutz menekankan bahwa realitas sosial dipahami manusia melalui proses interpretasi atas pengalaman hidup sehari-hari (life-world) dan intersubjektivitas dengan sesama anggota masyarakat (Schutz, 1967; Wita & Mursal, 2022); pendekatan ini menjadi landasan metodologis-filosofis untuk menggali makna subjektif yang dikonstruksi informan atas pengalamannya sebagai penerima maupun pengamat program bantuan sosial. Ketiga kerangka ini digunakan secara terintegrasi untuk membedah bagaimana persepsi individual bertautan dengan desain kebijakan perlindungan

sosial, serta bagaimana makna tersebut dikonstruksi secara intersubjektif dalam kehidupan sosial desa.

Berdasarkan uraian tersebut, sebagian besar penelitian terdahulu mengenai bantuan sosial masih didominasi pendekatan evaluatif-kuantitatif yang berfokus pada efektivitas penyaluran dan dampak ekonomi program, sementara kajian yang secara mendalam mengeksplorasi makna subjektif dan konstruksi persepsi masyarakat desa—khususnya dengan mengaitkannya pada teori persepsi sosial, perlindungan sosial, kewarganegaraan substantif, dan keadilan distributif—masih relatif terbatas. Kekosongan ini menjadi dasar urgensi akademik penelitian ini, yang berupaya memahami bagaimana masyarakat desa memandang program bantuan sosial pemerintah, faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut, serta implikasinya terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara eksplisit, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis persepsi masyarakat desa terhadap pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah, baik dari aspek keadilan, manfaat, maupun transparansi; (2) mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi terbentuknya persepsi masyarakat; (3) menggali pengalaman empiris penerima dan non-penerima bantuan dalam memaknai program bansos; dan (4) menyusun rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Melalui tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara kebijakan makro pemerintah dengan dinamika sosial di tingkat desa, serta memperkuat prinsip evidence-based policy

dalam bidang kesejahteraan sosial dan pendidikan kewarganegaraan.

METODE

Desain Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study), karena bertujuan memahami secara mendalam persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah di desa, dengan menekankan pada makna, pandangan subjektif, dan interpretasi sosial masyarakat terhadap kebijakan bansos, bukan pada pengukuran angka semata. Pendekatan fenomenologis digunakan sebagai landasan filosofis untuk menelusuri bagaimana masyarakat mengonstruksi makna atas pengalaman hidup mereka sebagai penerima maupun pengamat program bantuan sosial (Wita & Mursal, 2022). Melalui studi kasus, peneliti dapat menelusuri dinamika sosial, interaksi antara aparat desa dan warga, serta faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat terhadap program tersebut secara kontekstual dan mendalam, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kebijakan bantuan sosial berbasis komunitas (Fuaddah, 2023). Secara eksplisit, desain yang digunakan adalah studi kasus tunggal (single case study) bersifat deskriptif-eksploratif dengan landasan fenomenologis, yang memungkinkan penggalan data secara mendalam pada satu unit sosial tanpa bermaksud melakukan generalisasi statistik.

Lokasi Penelitian dan Penentuan Informan. Penelitian dilaksanakan di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: (1) desa yang secara aktif menerima dan menyalurkan program bansos pemerintah minimal selama tiga tahun terakhir;

(2) memiliki data penerima bantuan sosial yang terverifikasi; dan (3) tersedia aparat desa dan masyarakat yang bersedia menjadi informan penelitian. Subjek penelitian berjumlah 14 orang yang terbagi ke dalam empat kelompok informan, yaitu 5 orang penerima bantuan sosial (keluarga penerima manfaat PKH/BLT), 5 orang non-penerima bantuan sebagai pembanding persepsi keadilan, 2 orang aparat desa (kepala desa, perangkat desa, dan/atau petugas sosial), serta 2 orang tokoh masyarakat/tokoh agama yang memahami dinamika sosial desa. Komposisi informan pada masing-masing kelompok ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dinilai paling memahami fenomena yang diteliti, dengan kemungkinan penambahan informan menggunakan teknik snowball sampling apabila diperlukan. Jumlah akhir informan disepakati setelah mencapai titik kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika wawancara dan FGD lanjutan tidak lagi memunculkan informasi atau tema baru yang signifikan.

Prosedur Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan secara tatap muka dengan pedoman wawancara semi-terstruktur yang mencakup persepsi masyarakat tentang manfaat bansos, keadilan distribusi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Kedua, observasi lapangan dilakukan secara langsung terhadap proses penyaluran bantuan, interaksi masyarakat dengan aparat, serta reaksi warga terhadap penerima bansos, dengan mencatat situasi sosial dan konteks peristiwa di lapangan. Ketiga, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) digunakan untuk menggali

pendapat kolektif masyarakat mengenai efektivitas bansos sekaligus membandingkan persepsi antarkelompok penerima dan non-penerima. Keempat, studi dokumentasi dilakukan terhadap data penerima bansos, laporan realisasi penyaluran, berita acara, peraturan desa, serta arsip kegiatan untuk melengkapi dan mengonfirmasi hasil wawancara. Keempat teknik pengumpulan data dilaksanakan secara berurutan dan saling menguatkan: wawancara awal digunakan untuk memetakan isu, observasi dan FGD untuk memperdalam dan mengonfirmasi isu tersebut, sementara studi dokumentasi dilakukan di sepanjang proses untuk melengkapi data primer dengan bukti tertulis.

Teknik Analisis Data. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian secara simultan dengan pengumpulan data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data (menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data lapangan agar relevan dengan fokus penelitian), penyajian data (mengorganisasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk narasi tematik untuk mempermudah interpretasi), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (mengidentifikasi pola dan hubungan antara persepsi masyarakat dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhinya).

Strategi Keabsahan Data. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi) agar hasil penelitian valid dan reliabel (Nurfajriani et al., 2024). Strategi tambahan untuk memastikan keabsahan data mencakup member check (konfirmasi hasil

wawancara kepada informan) dan audit trail agar data dapat ditelusuri kembali ke sumber aslinya, sejalan dengan prinsip kredibilitas penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya multi-metode pemeriksaan keabsahan data (Luthfiyani & Murhayati, 2024).

Etika Penelitian. Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan etika ilmiah, meliputi persetujuan informan (informed consent) di mana setiap partisipan diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaannya, penerapan anonimitas identitas informan dalam pelaporan hasil, serta penyamaran nama asli informan menjadi inisial untuk melindungi privasi. Prosedur ini penting mengingat topik penelitian menyentuh aspek sensitif terkait kondisi ekonomi keluarga dan relasi kuasa antara warga dan aparat desa.

HASIL

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tegal yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Desa ini memiliki karakteristik wilayah semi-perdesaan dengan kombinasi aktivitas pertanian, peternakan, serta sektor informal. Secara sosial-ekonomi, masyarakat Desa Tegal tergolong heterogen dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal lainnya. Kondisi ini menjadikan program bantuan sosial pemerintah sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat. Sebagai desa penerima berbagai program bantuan sosial, Desa Tegal menerima antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Bantuan Sosial

Tunai (BST), Program Indonesia Pintar (PIP), serta bantuan pendidikan dan kesehatan lainnya. Pelaksanaan berbagai program tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Desa Tegal, terutama sejak terjadinya tekanan ekonomi akibat pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Persepsi masyarakat terhadap tujuan program bantuan sosial merupakan aspek fundamental dalam memahami bagaimana kebijakan publik dimaknai oleh warga sebagai penerima manfaat. Di Desa Tegal, persepsi ini tidak hanya terbentuk dari informasi formal yang disampaikan pemerintah, tetapi juga melalui pengalaman langsung, interaksi sosial antarwarga, serta kondisi ekonomi yang dihadapi sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang beragam terhadap tujuan bantuan sosial, yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima dimensi utama.

Pertama, mayoritas informan memandang bahwa tujuan utama bantuan sosial adalah memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, terutama pangan, pendidikan, dan kesehatan. Seorang informan penerima PKH (Ibu S, 39 tahun) menyatakan, “Bantuan ini sangat membantu, apalagi kalau lagi tidak ada penghasilan. Bisa untuk beli beras, kebutuhan anak sekolah juga.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial dipersepsikan sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) yang menjaga keberlangsungan hidup keluarga di tengah pendapatan yang tidak stabil, sejalan dengan temuan bahwa program bantuan pangan dan tunai secara konsisten membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok (Nauval & Suparti, 2025; Syata, 2024). Kedua, sebagian masyarakat memandang bansos sebagai bentuk

kepedulian negara terhadap rakyatnya, sebagaimana disampaikan seorang informan (Ibu T, 50 tahun): “Menurut saya, bantuan ini tanda bahwa pemerintah peduli sama rakyat kecil.” Namun demikian, sejumlah informan menilai kepedulian tersebut belum merata, sebagaimana ditegaskan oleh temuan bahwa distribusi bantuan yang timpang dapat menurunkan tingkat kepercayaan warga kepada pemerintah desa (Somanteri & Rachmat, 2025).

Ketiga, sebagian masyarakat memahami bansos sebagai hak warga negara yang seharusnya diterima oleh kelompok kurang mampu. Seorang informan (Bapak H, 42 tahun) menyatakan, “Kalau kita memang termasuk yang tidak mampu, ya seharusnya dapat. Itu hak kita.” Kesadaran ini mencerminkan pergeseran cara pandang dari bantuan sebagai belas kasihan menjadi bagian dari hak sosial kewarganegaraan, namun kesadaran tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh kesadaran akan tanggung jawab berpartisipasi, seperti tercermin dari pernyataan “Soal data atau musyawarah, biasanya ikut saja, tidak terlalu paham.” Pola ini menegaskan bahwa praktik kewarganegaraan substantif di tingkat desa masih berat sebelah pada dimensi hak dibandingkan partisipasi aktif (Nurhadi, 2026). Keempat, sebagian informan memahami bahwa bantuan idealnya bersifat sementara hingga penerima mampu mandiri secara ekonomi, namun dalam praktiknya banyak yang menerima bantuan dalam jangka panjang tanpa mekanisme keluar yang jelas, sebagaimana dikeluhkan seorang informan: “Sudah lama dapat bantuan, tapi tidak ada perubahan juga.”

Kelima, muncul pula persepsi kritis bahwa bansos berpotensi menimbulkan ketergantungan. Seorang informan (Bapak D, 48 tahun) menyatakan, “Kalau terus-terusan dapat

bantuan, orang jadi terbiasa dan malas usaha.” Kekhawatiran ini sejalan dengan temuan bahwa bantuan yang diberikan secara berkelanjutan tanpa program pemberdayaan ekonomi berisiko melemahkan motivasi kerja sebagian penerima manfaat, meskipun dampaknya terhadap peningkatan pendapatan relatif terbatas dibandingkan fungsinya dalam menstabilkan pengeluaran rumah tangga (Nurahman et al., 2025; Wahyudi et al., 2026). Meski demikian, tidak semua informan sepakat dengan pandangan tersebut; sebagian menegaskan bahwa “bantuan itu hanya tambahan, tetap harus kerja”, yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap ketergantungan sangat dipengaruhi oleh kondisi individu dan cara pemanfaatan bantuan. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Desa Tegal terhadap tujuan bantuan sosial bersifat multidimensional dan ambivalen—di satu sisi dipandang sebagai solusi ekonomi, wujud kepedulian negara, dan hak warga negara, namun di sisi lain juga dipersepsikan sebagai program yang belum sepenuhnya efektif, sumber ketidakadilan, dan potensi ketergantungan.

Persepsi masyarakat terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial merupakan aspek krusial dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan publik, karena proses ini tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai mekanisme yang menentukan keadilan, transparansi, dan legitimasi program di mata masyarakat. Isu yang paling dominan ditemukan adalah persepsi mengenai ketidakakuratan data penerima bantuan. Seorang informan (Bapak A, 47 tahun) menyatakan, “Kadang yang sudah mampu masih dapat bantuan, sementara yang benar-benar butuh justru tidak terdata.” Persoalan pembaruan data yang tidak berkala ini

konsisten dengan temuan bahwa keberlanjutan dan kualitas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di berbagai daerah masih menghadapi kendala komitmen dan kapasitas pemerintah daerah (Widyaningsih et al., 2023), yang pada gilirannya menyebabkan ketidaktepatan sasaran sebagaimana ditemukan pula pada kasus penyaluran bantuan di Provinsi DKI Jakarta, di mana ribuan penerima terbukti tidak memenuhi kriteria kelayakan akibat lemahnya sinkronisasi data (Azzahra et al., 2025).

Persepsi terhadap keadilan dalam penentuan penerima juga menjadi dimensi yang sangat sensitif. Seorang informan (Ibu R, 41 tahun) menegaskan, “Yang jadi masalah bukan bantuannya, tapi siapa yang dapat. Kalau tidak adil, pasti jadi omongan,” yang menunjukkan bahwa keadilan distribusi lebih diutamakan masyarakat dibandingkan besaran bantuan itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi bantuan publik di tingkat desa erat kaitannya dengan lemahnya penerapan prinsip keadilan distributif dalam kebijakan sosial (Keladu et al., 2026), serta dengan pola ketidakmerataan penyaluran bansos yang ditemukan di berbagai lokasi akibat ketidaksinkronan data dan keterbatasan alokasi anggaran (Ariansyah et al., 2025). Dugaan subjektivitas dalam penentuan penerima, seperti kedekatan personal dengan aparat, turut menjadi sumber kecurigaan meskipun aparat desa menegaskan bahwa penentuan penerima telah melalui musyawarah sesuai kriteria pemerintah.

Terkait mekanisme pendataan, sebagian masyarakat merasa tidak dilibatkan secara langsung, sebagaimana disampaikan seorang informan: “Kami tidak tahu bagaimana pendataannya, tiba-tiba sudah ada daftar

penerima.” Kondisi ini menunjukkan rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program, meskipun secara teoretis pendataan yang melibatkan RT/RW dianggap tepat karena kedekatannya dengan kondisi warga. Pada aspek sistem penyaluran, mayoritas informan mengakui adanya perbaikan melalui digitalisasi dan penggunaan sistem perbankan: “Sekarang lebih enak, bantuan langsung masuk ke rekening atau kartu.” Namun demikian, kesenjangan literasi digital di kalangan warga lanjut usia serta penyalahgunaan instrumen bantuan—seperti praktik menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera akibat tekanan kebutuhan finansial mendesak—tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan (Dewi et al., 2022; Fuaddah, 2023).

Pada aspek transparansi informasi, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara transparansi formal dan transparansi substantif. Seorang informan menyatakan, “Tidak semua orang tahu siapa saja yang dapat bantuan dan kenapa,” sementara aparat desa menegaskan bahwa informasi telah diumumkan melalui musyawarah desa dan papan informasi. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian bahwa transparansi pendataan bantuan sosial tunai di berbagai daerah secara administratif telah dijalankan sesuai prosedur, namun efektivitas penyampaian informasi kepada seluruh warga kerap belum optimal (Fardi et al., 2023). Adapun peran aktor lokal seperti kepala desa, perangkat desa, dan RT/RW dinilai cukup baik dalam menjembatani informasi, meskipun konsistensi penyampaian informasi dari tingkat atas ke warga masih memerlukan penguatan. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial di Desa Tegal bersifat kompleks: di satu sisi terdapat apresiasi terhadap perbaikan

sistem penyaluran dan peran aparat desa, namun di sisi lain terdapat kritik terhadap ketidakakuratan data, ketidakadilan distribusi, kurangnya transparansi, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, secara umum masyarakat Desa Tegal memiliki persepsi yang positif terhadap keberadaan program bantuan sosial pemerintah. Mayoritas informan mengakui bahwa bansos memberikan manfaat nyata, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi rentan, dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meningkat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakpastian pendapatan, serta berbagai tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat pedesaan. Manfaat yang paling banyak dirasakan adalah pemenuhan kebutuhan pangan keluarga—bantuan yang diterima, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan pangan, sering digunakan untuk membeli beras, minyak goreng, telur, serta kebutuhan pokok lainnya. Temuan ini memperkuat bukti bahwa program bantuan pangan dan tunai secara efektif meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin di berbagai wilayah Indonesia (Nauval & Suparti, 2025; Pangera et al., 2025).

Selain pemenuhan kebutuhan pangan, bantuan sosial juga memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Dana yang diperoleh sering digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan mendukung aktivitas belajar anak, sehingga tanpa bantuan tersebut sejumlah keluarga akan mengalami kesulitan mempertahankan akses pendidikan. Temuan ini sejalan dengan bukti sistematis bahwa program jaring pengaman sosial seperti PKH dan PIP berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga tidak mampu, meskipun

efektivitasnya bervariasi menurut konteks daerah dan besaran dana yang tersedia (Prastya et al., 2026). Lebih lanjut, bantuan sosial juga berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi keluarga di tengah ketidakpastian pendapatan pekerja informal, buruh harian, dan petani, dengan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial yang memberikan rasa aman meskipun jumlah bantuan tidak selalu besar.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya pandangan kritis terkait dampak jangka panjang bansos. Sejumlah informan mengungkapkan kekhawatiran bahwa bantuan yang diberikan secara terus-menerus tanpa diiringi program pemberdayaan ekonomi berpotensi menimbulkan ketergantungan dan menurunkan motivasi masyarakat untuk mencari sumber pendapatan yang lebih produktif. Kajian mutakhir mengenai ketergantungan penerima bantuan sosial menegaskan bahwa meskipun bansos penting untuk menjaga stabilitas pengeluaran rumah tangga rentan, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan jangka panjang relatif kecil apabila tidak diintegrasikan dengan program pemberdayaan (Wahyudi et al., 2026). Temuan ini memperlihatkan bahwa bansos memiliki dua sisi yang saling berkaitan: sebagai instrumen perlindungan sosial yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila tidak dikelola secara tepat.

Pada aspek transparansi dan akuntabilitas, masyarakat memiliki pandangan yang cukup kritis. Sejumlah informan mengungkapkan kesulitan memperoleh informasi jelas mengenai mekanisme penentuan penerima bantuan dan kriteria yang digunakan, sementara pemerintah desa menegaskan bahwa data penerima telah

dibahas dan diumumkan melalui forum musyawarah desa sesuai prosedur yang berlaku. Kesenjangan persepsi ini menegaskan bahwa transparansi yang diterapkan masih cenderung bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya menciptakan pemahaman yang merata di kalangan masyarakat, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menuntut keterbukaan informasi yang benar-benar dapat diakses dan dipahami oleh publik secara luas (Meiylisa et al., 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memandang pemerintah desa sebagai aktor yang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial, tidak hanya sebagai pelaksana administratif penyalur bantuan, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan masyarakat desa. Posisi pemerintah desa dianggap strategis karena menjadi institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan paling memahami kondisi sosial-ekonomi warga secara langsung, sejalan dengan temuan bahwa dinas dan aparat sosial di tingkat lokal berperan penting dalam pemerataan penyaluran bantuan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (Wulandary et al., 2025). Mayoritas informan menyatakan bahwa keberadaan pemerintah desa sangat membantu dalam memperoleh informasi mengenai program bantuan sosial, sebagaimana disampaikan seorang informan: “Kalau ada masalah, bisa ditanyakan ke RT atau desa.” Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lokal, sebagaimana ditegaskan bahwa transparansi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan

publik serta partisipasi warga (Somanteri & Rachmat, 2025).

Selain sebagai penyedia informasi, pemerintah desa juga dinilai memiliki peran penting dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan, bekerja sama dengan Ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat. Sebagian besar informan mengakui bahwa aparat desa telah berupaya melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan cukup responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang perlu dilaporkan. Responsivitas ini juga tampak dari kesediaan aparat menerima pertanyaan, masukan, maupun keluhan warga, yang menunjukkan adanya hubungan komunikasi yang relatif baik antara pemerintah desa dan masyarakat—kondisi yang sejalan dengan pentingnya strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik di tingkat desa (Kurnia et al., 2025).

Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap peran pemerintah desa tidak sepenuhnya positif. Kritik yang paling sering muncul berkaitan dengan belum meratanya penyampaian informasi kepada seluruh warga desa, sebagaimana disampaikan seorang informan: “Kadang informasi tidak sampai ke semua warga.” Kendala ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan media komunikasi, perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa, maupun kurangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi publik. Selain persoalan komunikasi, penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat mengharapkan peningkatan sosialisasi program yang lebih intensif dan berkelanjutan, mencakup penjelasan rinci mengenai kriteria penerima, mekanisme pengajuan keberatan, dan prosedur pembaruan data. Aspek lain yang menjadi

perhatian adalah responsivitas terhadap keluhan masyarakat; sebagian informan menilai proses penyelesaian keluhan terkait kesalahan data maupun permasalahan administrasi lain masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, kemampuan pemerintah desa merespons keluhan masyarakat merupakan indikator penting kualitas pelayanan publik, sehingga penguatan mekanisme pengaduan dan modal sosial berbasis kepercayaan, jaringan, dan norma menjadi krusial untuk mendorong partisipasi warga secara berkelanjutan (Permatasari et al., 2025; Yunita et al., 2025).

Sebagai rangkuman atas seluruh temuan yang diuraikan pada bagian ini, Tabel 1 menyajikan sepuluh aspek utama persepsi masyarakat Desa Tegal terhadap program bantuan sosial pemerintah beserta deskripsi ringkasnya.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Utama Persepsi Masyarakat Desa Tegal terhadap Program Bantuan Sosial Pemerintah

Aspek Temuan	Deskripsi Ringkas
Bansos sebagai penyelamat ekonomi	Memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan di tengah pendapatan yang tidak stabil
Bansos sebagai wujud kepedulian negara	Dipandang sebagai bukti kehadiran pemerintah, meski dirasa belum merata bagi semua warga
Bansos sebagai hak sosial warga negara	Kesadaran akan hak mulai tumbuh, namun belum diiringi kesadaran berpartisipasi
Bansos sebagai bantuan transisi	Idealnya bersifat sementara, namun banyak diterima jangka panjang tanpa exit strategy
Potensi ketergantungan	Muncul kekhawatiran menurunnya motivasi kerja tanpa program pemberdayaan ekonomi
Akurasi data penerima	Ditemukan kasus warga mampu masih terdata, sementara warga miskin belum terdata
Keadilan distribusi	Keadilan proses penentuan penerima lebih diutamakan warga daripada besaran bantuan
Transparansi informasi	Terdapat kesenjangan antara transparansi formal-prosedural dan pemahaman substantif warga
Partisipasi dan pengawasan warga	Rendahnya rasa memiliki (sense of ownership) warga atas proses pendataan bantuan

Peran pemerintah desa	Dinilai strategis sebagai penghubung, namun sosialisasi dan respons keluhan perlu diperkuat
-----------------------	---

Sumber: diolah dari hasil wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terarah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tegal, persepsi masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses sosial panjang yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, interaksi dengan lingkungan sosial, serta informasi yang diterima dari masyarakat sekitar. Melalui pendekatan fenomenologis, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat mengonstruksi makna bantuan sosial berdasarkan pengalaman subjektif yang mereka alami, sejalan dengan gagasan Schutz bahwa realitas sosial dipahami manusia melalui proses interpretasi atas pengalaman hidup sehari-hari (Schutz, 1967; Wita & Mursal, 2022). Dari hasil wawancara, ditemukan tiga konstruksi makna utama yang membentuk persepsi masyarakat terhadap program bantuan sosial, yaitu bantuan sosial sebagai “penyelamat ekonomi”, sebagai “hak sosial”, dan sebagai “ketergantungan”.

Makna pertama yang paling dominan adalah bantuan sosial sebagai penyelamat ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tegal yang beragam, dengan sebagian warga bekerja sebagai buruh harian, petani, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal lainnya, menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat cenderung tidak stabil sehingga bantuan sosial dipandang sebagai sumber dukungan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Temuan ini memperkuat bukti empiris bahwa efek positif bansos terhadap kesejahteraan sangat nyata dirasakan ketika masyarakat menghadapi guncangan ekonomi mendadak, seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan

harga kebutuhan pokok (Syata, 2024). Makna kedua adalah bantuan sosial sebagai hak sosial yang seharusnya diterima oleh warga negara yang memenuhi kriteria tertentu, sejalan dengan konsep kewarganegaraan sosial yang dikemukakan T. H. Marshall bahwa warga negara memiliki hak-hak sosial yang harus dipenuhi negara, termasuk hak atas kesejahteraan dan perlindungan sosial. Kesadaran akan hak sosial ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat, dari menganggap bansos sebagai pemberian sukarela pemerintah menjadi bagian dari hak-hak sosial yang dijamin negara—sebuah pergeseran penting dalam relasi negara dan warga negara yang juga ditemukan dalam kajian mengenai rekonstruksi hak politik kewarganegaraan dalam demokrasi Indonesia kontemporer (Nurhadi, 2026).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan konstruksi makna yang lebih kritis, yaitu bantuan sosial sebagai “ketergantungan”. Makna ini muncul dari pengalaman dan pengamatan sebagian informan terhadap dampak jangka panjang program bantuan sosial, di mana pemberian bantuan secara terus-menerus tanpa diiringi program pemberdayaan ekonomi berisiko menurunkan motivasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian bahwa efektivitas bansos sebagai sarana kebijakan ekonomi publik dapat tereduksi apabila implementasinya tidak diintegrasikan dengan strategi pemberdayaan yang jelas (Nurrahman et al., 2025), serta relevan dengan perdebatan konseptual mengenai bagaimana persepsi publik terhadap kelayakan (*deservingness*) penerima bantuan turut membentuk dukungan terhadap kebijakan kesejahteraan secara lebih luas (Haeder, 2025).

Ketiga konstruksi makna ini—penyelamat ekonomi, hak sosial, dan ketergantungan—tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dan membentuk sikap ambivalen masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan sosial di Desa Tegal telah dipahami masyarakat sebagai bagian dari hak sosial yang harus dijamin negara, mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun demikian, aspek partisipasi dan kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan bansos masih relatif lemah, sebagaimana tercermin dari rendahnya keterlibatan warga dalam proses pendataan dan musyawarah desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik kewarganegaraan substantif belum berkembang secara optimal, karena masyarakat masih lebih menekankan dimensi hak dibandingkan dimensi tanggung jawab dan partisipasi sebagai warga negara. Fenomena ini konsisten dengan argumen bahwa hak politik dan sosial kewarganegaraan tidak semata soal status hukum formal, tetapi menyangkut relasi kuasa, keterlibatan sipil, dan kualitas demokrasi yang memerlukan penguatan partisipasi aktif warga (Nurhadi, 2026).

Kesenjangan antara kesadaran hak dan praktik partisipasi ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman hak-hak warga negara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran mengenai tanggung jawab, partisipasi, dan kontrol sosial dalam kehidupan demokratis. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif terbukti berperan penting dalam membentuk sikap, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan yang positif pada generasi muda, sehingga dapat menjadi wahana strategis

untuk menumbuhkan kesadaran partisipatif masyarakat sejak dini (Cicilia et al., 2022). Dengan demikian, keberhasilan program bantuan sosial pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana masyarakat memiliki kapasitas kewarganegaraan yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab—bukan sekadar sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai warga negara yang turut mengawal implementasi kebijakan publik.

Persepsi positif maupun negatif masyarakat terhadap bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh sejauh mana program tersebut dianggap adil dalam proses distribusinya. Ketika bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan transparan, masyarakat cenderung memberikan penilaian positif; sebaliknya, ketika terdapat ketidaksesuaian data atau ketidakjelasan proses penentuan penerima, muncul persepsi ketidakadilan yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini menegaskan relevansi teori keadilan distributif dalam kebijakan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian implementasi kebijakan kesejahteraan sosial yang mengungkap bahwa ketimpangan distribusi bantuan publik di tingkat desa erat kaitannya dengan lemahnya validitas data, bias kedekatan sosial, dan minimnya transparansi (Keladu et al., 2026).

Persoalan keadilan distributif ini semakin krusial mengingat temuan bahwa ketidakmerataan penyaluran bansos di berbagai daerah sering kali bersumber dari persoalan struktural, seperti ketidaksinkronan data lintas lembaga dan keterbatasan alokasi anggaran, bukan semata kesalahan individu petugas di lapangan (Ariansyah et al., 2025). Kasus serupa juga ditemukan pada audit penyaluran bantuan sosial di tingkat provinsi, di mana ribuan penerima terbukti tidak memenuhi kriteria

kelayakan akibat lemahnya sinkronisasi dan pembaruan data antarinstansi (Azzahra et al., 2025). Hal ini memperkuat argumen bahwa akurasi dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial secara berkelanjutan merupakan prasyarat mendasar bagi terwujudnya keadilan distributif dalam kebijakan bantuan sosial (Widyaningsih et al., 2023). Dengan demikian, legitimasi kebijakan bansos di mata masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin ketepatan sasaran dan keadilan prosedural dalam keseluruhan siklus kebijakan, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penyaluran.

Berdasarkan sintesis temuan penelitian, terdapat sejumlah tantangan utama dalam implementasi program bantuan sosial di tingkat desa yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, validitas dan akurasi data penerima yang masih menjadi sumber utama ketidakpuasan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian mengenai urgensi pemutakhiran data terpadu kemiskinan secara berkelanjutan (Widyaningsih et al., 2023). Kedua, kurangnya transparansi informasi yang menyebabkan kesenjangan antara transparansi formal-prosedural dengan transparansi substantif yang benar-benar dapat diakses dan dipahami masyarakat (Fardi et al., 2023). Ketiga, potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan secara berkelanjutan tanpa program pemberdayaan yang memadai (Wahyudi et al., 2026). Keempat, keterbatasan literasi digital sebagian warga—khususnya kelompok lanjut usia—dalam mengakses dan memanfaatkan sistem penyaluran bantuan berbasis digital, yang apabila tidak diatasi dapat memperlebar kesenjangan akses terhadap program bantuan itu

sendiri (Fuaddah, 2023). Kelima, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program, yang menegaskan pentingnya strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik di tingkat desa secara lebih sistematis (Kurnia et al., 2025).

Tantangan-tantangan tersebut saling terkait satu sama lain: lemahnya validitas data memicu persepsi ketidakadilan, ketidakadilan memicu penurunan kepercayaan, dan rendahnya kepercayaan pada gilirannya menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan program. Rantai kausalitas ini menunjukkan bahwa perbaikan program bantuan sosial memerlukan intervensi yang bersifat sistemik dan lintas dimensi, bukan sekadar perbaikan pada satu aspek administratif semata.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dirumuskan sebuah model ideal pengelolaan bantuan sosial berbasis persepsi masyarakat yang mencakup lima komponen utama. Pertama, pendataan berbasis partisipasi warga, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal pendataan hingga verifikasi, bukan sekadar menjadi objek pendataan yang pasif. Kedua, transparansi terbuka melalui berbagai media publik desa—termasuk papan informasi, media sosial desa, dan forum musyawarah—untuk memastikan seluruh warga memiliki akses informasi yang setara mengenai kriteria dan proses penetapan penerima bantuan (Meiyulisa et al., 2026).

Ketiga, integrasi bantuan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga bansos tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan konsumtif tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Penguatan modal

sosial—yang mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan antarwarga—terbukti berperan penting dalam mendorong keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Permatasari et al., 2025; Yunita et al., 2025). Keempat, penguatan peran pemerintah desa sebagai fasilitator yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat, sejalan dengan temuan bahwa peran dinas sosial dan aparat desa yang responsif signifikan dalam mendukung pemerataan penyaluran bantuan (Wulandary et al., 2025). Kelima, mekanisme pengaduan yang responsif dan mudah diakses, sehingga keluhan masyarakat terkait kesalahan data maupun ketidaktepatan sasaran dapat ditindaklanjuti secara cepat dan transparan—sebuah prinsip yang selaras dengan pendekatan evaluasi kebijakan berbasis dampak yang menilai efektivitas, kecukupan, dan responsivitas program secara komprehensif (Zakirin & Arifin, 2022).

Model ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan bantuan sosial pada akhirnya bertumpu pada kualitas relasi antara negara dan warga negara yang dibangun melalui partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas—bukan semata pada besaran anggaran atau cakupan penerima bantuan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori persepsi sosial yang menjelaskan bahwa penilaian individu terhadap kebijakan publik dibentuk oleh pengalaman, interaksi sosial, serta informasi yang diterima dari lingkungan sekitar. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif-teknis pelaksanaan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan dan dimaknai oleh masyarakat

sebagai sasaran kebijakan—sebuah argumen yang juga relevan dalam konteks perdebatan global mengenai bagaimana framing kebijakan kesejahteraan memengaruhi dukungan publik terhadap program-program sosial (Lowder, 2025). Penelitian ini juga memperkuat konsep kewarganegaraan substantif yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab warga negara, serta teori keadilan distributif yang menegaskan bahwa legitimasi kebijakan sosial sangat ditentukan oleh persepsi keadilan dalam proses distribusinya. Sejalan dengan itu, teori persepsi sosial (Satria & Neviyarni, 2025) menjelaskan bagaimana penilaian individu tersebut terbentuk secara kognitif dari pengalaman dan interaksi sosial, sementara temuan penelitian juga menegaskan relevansi konsep perlindungan sosial (Midgley, 2020) yang memandang bansos idealnya berfungsi sebagai instrumen protektif sekaligus produktif, serta pendekatan fenomenologi Schutz (1967) yang menjelaskan bagaimana makna tersebut dikonstruksi secara intersubjektif dalam pengalaman hidup sehari-hari masyarakat desa.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Pertama, diperlukan perbaikan sistem data terpadu kesejahteraan sosial melalui pembaruan berkala agar proses pendataan dan penetapan penerima dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan transparansi pelaksanaan bansos melalui pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan partisipatif, dengan tetap memperhatikan kesenjangan literasi digital pada kelompok rentan. Ketiga, program bantuan sosial perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui

pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro, agar bantuan tidak hanya mengurangi beban ekonomi jangka pendek tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan berkelanjutan. Keempat, pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi program perlu diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadilan penyaluran bantuan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasilnya. Pertama, penelitian hanya dilakukan di satu lokasi, yaitu Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi masyarakat di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sangat bergantung pada persepsi, pengalaman, dan interpretasi subjektif informan, sehingga hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh sudut pandang masing-masing informan dalam memaknai program bantuan sosial. Ketiga, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang relatif singkat, sehingga belum mampu menangkap perubahan persepsi masyarakat yang mungkin terjadi dalam jangka panjang. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana masyarakat memandang program bantuan sosial pemerintah serta berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi tersebut di tingkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat desa terhadap program bantuan sosial pemerintah di Desa Tegal,

Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat bersifat multidimensional dan cenderung ambivalen. Di satu sisi, mayoritas masyarakat memiliki persepsi positif terhadap bantuan sosial sebagai program yang memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus sebagai wujud kepedulian negara dan pemenuhan hak sosial warga negara. Di sisi lain, masyarakat juga mengonstruksi makna kritis berupa kekhawatiran terhadap potensi ketergantungan apabila bantuan tidak diiringi program pemberdayaan ekonomi yang memadai.

Persepsi masyarakat terbentuk melalui pengalaman langsung sebagai penerima manfaat, interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, serta informasi yang diperoleh dari aparat desa dan sesama warga. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaktepatan sasaran penerima, kurangnya transparansi informasi mengenai kriteria dan proses penentuan penerima, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi persoalan utama yang memengaruhi persepsi keadilan masyarakat terhadap program bantuan sosial. Peran pemerintah desa dinilai cukup strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat, meskipun aspek komunikasi publik, sosialisasi program, dan responsivitas terhadap keluhan warga masih memerlukan penguatan.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik kewarganegaraan substantif di tingkat desa belum berkembang secara optimal, karena masyarakat masih lebih menekankan dimensi hak dibandingkan dimensi tanggung jawab dan partisipasi aktif sebagai warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan bantuan sosial pada akhirnya tidak semata

ditentukan oleh besaran anggaran yang digelontorkan, tetapi oleh kualitas tata kelola, keadilan distributif, transparansi, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus kebijakan. Secara keilmuan, temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan memperkaya pemahaman tentang bagaimana persepsi sosial, prinsip perlindungan sosial, dan kesadaran kewarganegaraan substantif saling bertautan dalam menentukan efektivitas dan legitimasi kebijakan bantuan sosial di aras lokal, sekaligus menawarkan kerangka analisis yang dapat direplikasi pada konteks desa lain dengan karakteristik sosial-ekonomi berbeda.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah aplikatif. Bagi pemerintah pusat dan daerah, diperlukan pembaruan dan validasi data penerima bantuan sosial secara berkala melalui sistem seperti DTSEN, disertai kanal aduan lintas-jenjang yang memungkinkan koreksi data secara cepat, serta pengembangan skema bansos berjangka yang secara eksplisit diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar bantuan tidak menjadi ketergantungan permanen. Bagi pemerintah Desa Tegal secara khusus, diperlukan penerbitan daftar penerima dan kriteria kelayakan secara berkala melalui papan informasi, grup komunikasi digital, dan musyawarah desa, disertai standar waktu tindak lanjut pengaduan yang jelas dan terpublikasi agar keluhan warga terkait kesalahan data dapat ditangani secara terukur. Bagi masyarakat, diperlukan penguatan forum warga atau kelompok pemantau independen di tingkat dusun yang secara rutin mengawal proses pendataan dan penyaluran bantuan, sebagai wujud konkret partisipasi aktif warga negara,

bukan sekadar sebagai penerima manfaat pasif. Bagi pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi materi mengenai hak dan tanggung jawab kewarganegaraan substantif ke dalam program penyuluhan sosial maupun kurikulum pendidikan kewarganegaraan di tingkat desa dan sekolah, sebagai upaya membangun kesadaran partisipatif masyarakat sejak dini. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian pada desa dengan karakteristik sosial-ekonomi berbeda, mengembangkan pendekatan metodologis campuran (mixed methods) guna mengukur secara kuantitatif hubungan antara persepsi keadilan distributif dan tingkat partisipasi warga, serta mengkaji lebih lanjut efektivitas model integrasi bansos dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dalam konteks pembangunan sosial dan demokrasi lokal yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, D., Sagita, M., Julia, R. A., & Sarmila. (2025). Analisis faktor penyebab ketidakmerataan penyaluran bansos kepada masyarakat miskin. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482268>
- Azzahra, A., Musyaffi, A. M., & Khairunnisa, H. (2025). Analisis akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 811–829. <https://doi.org/10.63822/rn7bb605>
- Cicilia, I., Marsidi, Martini, & Santoso, G. (2022). Pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 146–155. <https://doi.org/10.9000/jpt.v1i3.420>
- Dewi, R., Nurjannah, S., & Komalasari, M. A. (2022). Studi fenomena penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera pada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(1), 119–139. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i1.140>
- Fardi, M., Pratama, I. N., Darmansyah, & Amil. (2023). Transparansi pendataan program bantuan sosial tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pegesangan, Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 3(3), 150–155. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.209>
- Fuaddah, A. (2023). Literasi digital masyarakat sebagai respon persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran (Studi kasus di Kelurahan Nanggower, Cibinong, Bogor, Jawa Barat). *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 4(2), 74–82. <https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v4i2.86805>
- Haeder, S. F. (2025). How long-held perceptions of deservingness continue to shape public attitudes about program eligibility. *Politics & Policy*. <https://doi.org/10.1111/polp.70033>
- Investor Trust. (2026, 5 Agustus). Penduduk miskin per Maret 2026 tinggal 22,9 juta atau 8,07%, tapi kesenjangan sosial sedikit melebar. <https://investortrust.id/macro/111941/penduduk-miskin-per-maret-2026-tinggal-22-9-juta-atau-8-07-tapi-kesenjangan-sosial-sedikit-melebar>
- Keladu, Y., Bhoga, F., Uran, F. B., Oes, G. H. T., Lerek, B. A., Da'a, H. O., Duka, B. N. P., & Bedeman, D. B. (2026). Analisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka: Tinjauan teori keadilan. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 4(3), 35–57. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v4i3.842>
- Kurnia, H. A., Purwatiningsih, A., & Ghunu, A. (2025). Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan prima di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau,

- Kabupaten Malang. *Indonesian Social Science Review*, 3(2), 73–81.
<https://doi.org/10.61105/issr.v3i2.183>
- Lowder. (2025). Reframing welfare policy: Experimental impacts on public perceptions. *Poverty & Public Policy*.
<https://doi.org/10.1002/pop4.70039>
- Luthfiyani, P. W., & Murhayati, S. (2024). Strategi memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45315–45328.
- Mahfudhoh, K., & Kinseng, R. A. (2023). Persepsi masyarakat dan konflik bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(1), 91–110.
<https://doi.org/10.33369/jsn.9.1.91-110>
- Meiyulisa, D. I., Fariyanto, Z. N. A., Azzahra, P. A. J., Silfiani, E. A., & Oktariyanda, T. A. (2026). Analisis manajemen pelayanan bantuan sosial dalam meningkatkan kepercayaan publik. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 12(1), 751–760.
<https://doi.org/10.9963/ewgz4c47>
- Midgley, J. (2020). *Pembangunan sosial: Teori dan praktik* (M. A. Hadiwinata & S. Abbas, Terj.). UGM Press.
- Nauval, M., & Suparti, H. (2025). Evaluation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in poverty alleviation in Halong Village, Haruai Sub-District, Tabalong Regency. *JAPB (Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis)*, 8(1), 733–745.
<https://doi.org/10.35722/japb.v8i1.1204>
- Nurahman, R., Hermawati, A. S. P., Wahdah, N., Alfiah, S., Afyah, N., Hardiansyah, D., Helmi, L., & Herdiana, D. (2025). Efektivitas program bantuan sosial sebagai sarana kebijakan ekonomi publik. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15588797>
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Nurhadi, M. F. (2026). Rekonstruksi hak politik kewarganegaraan: Transformasi relasi negara-warga dalam demokrasi Indonesia. *Master Kajian Literasi Kewarganegaraan*, 2(1), 13–28.
<https://doi.org/10.63461/kalisa.v2i1.324>
- Pangera, A. M. F. H. T., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak dan efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(3), 3580–3592.
<https://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3171>
- Permatasari, S. D. I., Huda, M. M., & Swasanti, I. (2025). Analisis modal sosial dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi di LAZISNU Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 89–100.
<https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4041>
- Prastya, E. D., Wijoyo, H., Wardani, D. K., & Sabandi, M. (2026). Dampak program jaring pengaman sosial terhadap keberlanjutan pendidikan anak di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 4687–4694.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.5150>
- Rahmalita, A., Putri, A. R. W., Damayanti, M., & Sari, N. E. (2025). Analisis penyaluran bantuan PKH untuk menggetaskan kemiskinan di Desa Setono. *EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 5(2).
<https://doi.org/10.24127/edunomia.v5i2.7515>
- Robi, L. R., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 118–127.
<https://doi.org/10.29303/risma.v3i3.892>
- Satria, B., & Neviyarni, S. (2025). Persepsi sosial dan kognisi sosial: Perspektif psikologi dalam dinamika sosial. *JOTE (Journal on Teacher Education)*, 6(2), 166–169.
<https://doi.org/10.31004/jote.v6i2.40402>

- Schutz, A. (1967). *The phenomenology of the social world* (G. Walsh & F. Lehnert, Terj.). Northwestern University Press. (Karya asli terbit 1932).
- Somanteri, A., & Rachmat, R. (2025). Determinasi kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Cianjur Selatan. *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 339–352. <https://doi.org/10.61492/cantaka.v3i2.475>
- Syata, W. M. (2024). Efektifitas program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 554–559. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2486>
- Tirto.id. (2026, 13 April). Pembaruan data bansos 2026: 11 ribu KPM dicoret, 25 ribu masuk. <https://tirto.id/pembaruan-data-bansos-2026-11-ribu-kpm-dicoret-25-ribu-masuk-hucq>
- Wahyudi, D., Rizky, A., & Ismanto, D. T. (2026). Ketergantungan penerima bantuan sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Malang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(1), 16–24. <https://doi.org/10.70214/jwcm4c85>
- Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, & Toyamah, N. (2023). Urgensi memutakhirkan data terpadu kemiskinan secara berkelanjutan dan berkualitas: Pembelajaran dari studi kasus di enam daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 31(2), 179–200. <https://doi.org/10.55981/jep.2023.1013>
- Wita, G., & Mursal, I. F. (2022). Fenomenologi dalam kajian sosial: Sebuah studi tentang konstruksi makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 325–338. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211>
- Wulandary, R. M. C., Trihardiyanto, W., & Rinung, I. (2025). Peran Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu. *Indonesian Social Science Review*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.61105/issr.v3i1.141>
- Yunita, Nurmalasyari, Ulia, A. R., Ardiansyah, M. F., Inayah, A. U., & Salsabila, G. V. (2025). Analisis peran modal sosial dalam mendorong pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan inklusif berkelanjutan. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 1786–1797.
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi kebijakan dilihat dari aspek dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur. *JAPB (Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis)*, 5(1), 256–271.